

**ANALISIS EFEKTIFITAS SANKSI PIDANA DALAM  
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN  
2011 TENTANG PENGELOLAAN  
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN  
(Studi Kasus di Kota Banjarmasin)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun Oleh:

Muhammad Davin Rakhmatullah

NIM 202110110311256

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

ANALISIS EFEKTIFITAS SANKSI PIDANA DALAM PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN  
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN (STUDI KASUS DI  
KOTA BANJARMASIN)

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:  
MUHAMMAD DAVIN RAKHMATULLAH  
NIM: 202110110311256

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2025

**ANALISIS EFEKTIFITAS SANKSI PIDANA DALAM PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN  
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN (STUDI KASUS DI  
KOTA BANJARMASIN)**

Diajukan Oleh:


**MUHAMMAD DAVIN RAKHMATULLAH**

202110110311256

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 18 Oktober 2025

Pembimbing Utama,

  
Sumali, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,

  
Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH



  
Prof. Dr. H. Longat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

  
Cholidah, SH., MH

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**MUHAMMAD DAVIN RAKHMATULLAH**

202110110311256

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 18 Oktober 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Sumali, SH., M.Hum

Sekretaris : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH

Penguji I : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Penguji II : Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li

The image shows four handwritten signatures in black ink, each placed on a horizontal line. The signatures are written in a cursive style. The first signature is at the top, followed by three more below it, corresponding to the four members of the exam board listed on the left.

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MUHAMMAD DAVIN RAKHMATULLAH

NIM : 202110110311256

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS EFEKTIFITAS SANKSI PIDANA DALAM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN (STUDI KASUS DI KOTA BANJARMASIN)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ng, 20 Oktober 2025  
  
METERAI  
TEKAPAL  
34AKX669033791

**Muhammad Davin Rakhmatullah**



UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
MALANG



## FAKULTAS HUKUM

hukum.umma.ac.id | fh@umma.ac.id

### SURAT TUGAS

Nomor : E.2.K/718/TH-UMM/X/2025

1. Pejabat yang memberi tugas : Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Malang
2. Nama yang diberi tugas : ***Terlampir***
3. Jabatan yang diberi tugas : Dosen Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Malang
4. Alamat / kedudukan : Di Malang
5. Yang bersangkutan diberi tugas : **Sebagai Dosen Pembimbing Skripsi  
Mahasiswa Semester Ganjil Tahun Akademik  
2025/2026**
6. Tugas tersebut dilaksanakan : Sejak surat dikeluarkan sampai dengan 06  
Oktober 2026
7. Keterangan lain – lain : Tunaikan tugas dengan penuh tanggung jawab  
sebagai amanah

\*Dengan diterimanya Surat Tugas ini maka dengan sekaligus sebagai pemberitahuan masa berakhirnya tugas pembimbingan skripsi sehingga tidak perlu pemberitahuan tertulis.

Malang, 06 Oktober 2025

Dekan,



Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum



Kampus 1  
Jl. Sekeloa 1, Malang, Jawa Timur  
W: +62 341 821 210 (Pusat)  
F: +62 341 821 431

Kampus 2  
Jl. Sekeloa 2, Malang, Jawa Timur  
W: +62 341 821 210 (Pusat)  
F: +62 341 821 431

Kampus 3  
Jl. Sekeloa 3, Malang, Jawa Timur  
W: +62 341 821 210 (Pusat)  
F: +62 341 821 431  
E: [sekeloa3@umma.ac.id](mailto:sekeloa3@umma.ac.id)

## UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

### **Ungkapan Pribadi**

*Skripsi ini saya persembahkan:*

*Pertama, untuk diri saya sendiri yang telah berjuang dan berhasil melewati perkuliahan ini dengan tuntas.*

*Kedua, untuk kedua orang tua saya senantiasa memberi do'a dan dukungan semangat. Terima kasih kepada kedua orang tua mampu menghantarkan anaknya dari awal sampai akhir dan semoga gelar ini bisa menjadi amanah dan berbakti kepada kedua orang tua.*

### **Motto**

*“Tidak peduli seberapa sulit jalannya, aku tidak akan pernah menyerah sampai mimpi jadi kenyataan.”*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah atas rahmat, nikmat, taufiq, hidayah, serta atas izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, dengan judul “ANALISIS EFEKTIFITAS SANKSI PIDANA DALAM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN (Studi Kasus di Kota Banjarmasin).” Tugas Akhir ini bertujuan untuk Memenuhi kewajiban Penulis dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang sebagai salah satu proses penyelesaian Pendidikan S-1 Sarjana Hukum. Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan pemerhati hukum. Dan tidak lupa secara khusus Penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua Bapak Deddy Sophian dan Ibu Nurul Muslimah yang selalu mendidik, mendoakan, memberikan fasilitas terbaik, serta selalu mensupport Penulis dalam hal kebaikan;
2. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum, serta jajaran Dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
3. Ibu Cholidah, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
4. Bapak Sumali S.H, M.Hum, selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak Muhammad Luthfi S.H, S.Sy.,M.H, selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum UMM yang telah memberikan, menyalurkan ilmu selama kegiatan perkuliahan serta seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang membantu untuk melengkapi syarat-syarat administrasi;

7. Orang spesial yang selama ini ada untuk penulis yakni Adelia Agustin dan Ibu Yuli yang selalu mensupport Penulis, menemani penulis dalam hal apapun.
8. Teman-teman dekat selama di perkuliahan, Haris, Ibnu, Abi, dan Denny, yang telah berjuang bersama-sama memberikan dukungan dalam proses perkuliahan, maupun dalam menghadapi berbagai permasalahan di kehidupan penulis, yang selalu ada buat penulis, akhirnya Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Penulisan Tugas Akhir ini sudah layak untuk mendapatkan gelar strata 1 dan dipertahankan dihadapan penguji. Penulis memohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam Tugas Akhir ini, pemikiran yang berbentuk kritik dan saran sangat dibutuhkan oleh penulis untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Demikian yang dapat Penulis sampaikan, Penulis ucapkan terimakasih Semoga Tugas Akhir ini bisa memberi manfaat untuk kita semua.

Malang , 19 September 2025

Penulis



Muhammad Davin Rakhmatullah

## ABSTRAK

**Nama : Muhammad Davin Rakhmatullah**  
**NIM : 202110110311256**  
**Judul : Analisis Efektifitas Sanksi Pidana dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)**  
**Pembimbing : Sumali S.H, M.Hum**  
**Muhammad Luthfi S.H, S.Sy.,M.H**

Masalah sampah di Kota Banjarmasin semakin rumit karena populasi yang meningkat, rendahnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya fasilitas pengelolaan sampah. Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan Kota Banjarmasin mengatur sanksi pidana berupa kurungan maupun denda bagi pelanggar, tetapi efektivitasnya masih belum optimal, terlihat dari banyaknya kasus pembuangan sampah sembarangan. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, didukung data primer melalui wawancara dengan Hakim, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, serta masyarakat, dan data sekunder dari peraturan, dokumen resmi, serta literatur terkait untuk menganalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis dengan cara menggambarkan fakta yang ditemukan dari banyaknya pelanggaran membuang sampah sembarangan yang terjadi di Kota Banjarmasin. Terdapat 3 (tiga) faktor yang menjadi penghambat penerapan efektivitas terhadap pelaksanaan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan Kota Banjarmasin dan terdapat 4 (empat) kendala-kendala dalam penegakan hukum di Kota Banjarmasin terhadap pelanggaran membuang sampah sembarangan berdasarkan Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan Kota Banjarmasin untuk mencegah terjadinya pelanggaran membuang sampah sembarangan.

**Kata kunci : Efektifitas, Sanksi, Pidana, Peraturan Daerah, Kota Banjarmasin**

## ABSTRACT

**Name : Muhammad Davin Rakhmatullah**

**NIM : 202110110311256**

**Title : *Analysis of the Effectiveness of Criminal Sanctions in the Implementation of Local Regulation No. 21 of 2011 concerning Garbage Management/Cleaning and Landscaping (Case Study in Banjarmasin City)***

**Pembimbing : Sumali S.H, M.Hum**

**Muhammad Luthfi S.H, S.Sy.,M.H**

*The garbage problem in Banjarmasin City is becoming increasingly complex due to population growth, low public awareness, and a lack of garbage management facilities. Local Regulation No. 21 of 2011 concerning Garbage Management/Cleanliness and Parks in Banjarmasin City stipulates criminal sanctions in the form of imprisonment or fines for violators, but its effectiveness is still not optimal, as evidenced by the large number of cases of illegal garbage disposal. This study uses an empirical method with a sociological-legal approach, supported by primary data obtained through interviews with judges, the Environmental Agency, the Public Order Agency, and the community, and secondary data from regulations, official documents, and related literature to analyze qualitatively using a descriptive-analytical method by describing the facts found from the many violations of illegal garbage disposal that occur in the city of Banjarmasin. There are three factors that hinder the effective implementation of criminal sanctions in Local Regulation No. 21 of 2011 concerning Garbage Management/Cleanliness and Parks in the City of Banjarmasin, and there are four obstacles in law enforcement in Banjarmasin City against illegal dumping violations based on Local Regulation No. 21 of 2011 concerning Garbage Management/Cleanliness and Landscaping in Banjarmasin City to prevent illegal dumping violations.*

**Keywords: *Effectiveness, Sanctions, Criminal, Local Regulations, Banjarmasin City***

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK .....	x
ABSTRACT .....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	15
D. Manfaat Penelitian .....	15
E. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	16
2. Lokasi Penelitian .....	17
3. Jenis Data .....	17
4. Teknik Pengumpulan Data .....	18
5. Teknik Analisa Data .....	19
F. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II.....	22
TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Mengenai Peraturan Perundang-Undangan .....	22
B. Tinjauan Mengenai Peraturan Daerah.....	29
C. Tinjauan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan.....	37
D. Tinjauan Mengenai Teori Efektivitas.....	40
BAB III.....	45
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Keadaan Geografis Lokasi Penelitian di Kota Banjarmasin.....	45
B. Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana dalam Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan Kota Banjarmasin .....	51
C. Kendala-Kendala Penegakkan Perda No. 21 tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan Kota Banjarmasin .....	76
BAB IV .....	94

KESIMPULAN DAN SARAN .....	94
A. Kesimpulan .....	94
B. Saran .....	96
DAFTAR PUSTAKA .....	98
LAMPIRAN .....	105
GAMBAR .....	112



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahadi, L. M. A. (2022). Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum. *Jurnal Usm Law Review*, 5(1), 110–127.
- Antara Kalsel. (2024). *Banjarmasin Tindak Puluhan Pelanggaran Perda Kebesihan*.
- Asshiddiqie, Jimly. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers.
- Aulia, D. N., & Mahwani, Y. E. (2020). The Implementation of the Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) concept on Taman Setiabudi Indah 1 Estate, Medan City, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 452(1), 012153.
- Barda Nawawi Arief. (2017). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana.
- Barda Nawawi Arief. (2017). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana.
- Braga, A. A., Weisburd, D., & Turchan, B. (2019). Focused deterrence strategies effects on crime: A systematic review. *Campbell Systematic Reviews*, 15(3), e1051.
- Bunga, M. (2020). MODEL PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG IDEAL DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), 818.  
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2342>
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (n.d).  
<https://Satudata.Banjarmasinkota.Go.Id>.

- Dwiatmoko, A., & Nursadi, H. (2022). Problematika Dan Penataan Pembentukan Peraturan Daerah Melalui Harmonisasi Yang Sentralistik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 292–306.
- Farrah Putri Affifah, <https://www.tribunnews.com/nasional/2024/12/19/umk-banjarmasin-2025-naik-jadi-rp-3599182-berlaku-mulai-1-januari-2025>. P. F. P. A. (2024, December 19). *UMK Banjarmasin 2025, Naik Jadi Rp 3.599.182, Berlaku Mulai 1 Januari 2025*.
- Firdaus, M. A., & Mursalin, A. (2022). Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin. *Banua Law Review*, 4(2), 196–203.
- Fitri, R. (2018). Hukum Agraria Bidang Pertanahan Setelah Otonomi Daerah. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(3), 421–438.
- Friedman, L. M. (2020). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusamedia.
- Goenmiandari, B., Silas, J., & Supriharjo, R. (2010). Konsep penataan permukiman bantaran sungai di Kota Banjarmasin berdasarkan budaya setempat. *Seminar Nasional Perumahan Permukiman Dalam Pembangunan Kota*, 1–14.
- Guanti, W., & Armanijah, W. (2021). Pengaturan Materi Muatan Larangan Bermain Layangan Pada Perda Ketertiban Umum Di Kabupaten Sambas. *AL-SULTHANIYAH*, 10(1), 28–38.
- Hadi, S. (2018). Proses Pembentukan Peraturan Daerah Prakarsa Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang

- Disabilitas (Di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jember) Diss. *Universitas Muhammadiyah Jember*.
- Hanum, C. (2017). Analisis Yuridis terhadap Asas-Asas Pembentukan dan Asas-Asas Materi Muatan Peraturan Daerah: Kajian Perda Syariah di Indonesia. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 7(1).
- Helmi, H. (2021). Penataan Peraturan Daerah Dengan Metode Omnibus Law: Urgensi Dan Mekanisme. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(2), 441–472.
- Hendra Saputra. (2025, September 5). Kota Malang Sabet Penghargaan Clean Air ASEAN 2025, Bukti Serius Jaga Kualitas Udara, . [Www.Jatimtimes.Com](http://www.jatimtimes.com).
- Huzaeni, M. R. (n.d.). *Pelaksanaan Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*.
- Iqsandri, R. (2022a). Pengaruh politik terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. *Journal of Criminology and Justice*, 2(1), 1–3.
- Iqsandri, R. (2022b). Pengaruh politik terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. *Journal of Criminology and Justice*, 2(1), 1–3.
- Laman, I. (2025). MUI FATWA AUTHORITY ON POLICY FORMATION IN INDONESIA SIYASAH DUSTURIYAH PERSPECTIVE. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah*, 6(1), 173–185.
- Lestari, D. A. (2022). *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peran Hakim dalam Restorative Justice di Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Milky, F. J., Ucuq, Y., & Sidarta, D. D. (2024). Asas Ketaraan Gender Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman

- Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 4(03), 1–10.
- Mulyani, B. (2020). Dekonstruksi Pengawasan Peraturan Daerah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Juridica*, 2(1), 91–113.
- Murjani, M., & Sagama, S. (2020). Efektifitas peraturan daerah tentang perlindungan anak dalam memberikan perlindungan kepada anak. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11(1), 102–110.
- Nurjihad, T. (2023). Omnibus Law dalam Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 20 No. 1*, 15–28.
- Orlando, G. (2022). Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 6(1).
- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampahan / Kebersihan dan Pertamanan.
- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- Prasna, A. D. (2022). Tinjauan Lembaga Peradilan Adat Minangkabau Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia (Kajian Terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Di Provinsi Sumatera Barat). *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(2), 427–437.
- Pratama, R. R., Setiadi, W., & Hukum, F. (2021). Kedudukan Ketetapan Mpr Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. *Lex Journalica*, 8, 309–322.
- Prayitno, S. (2017). Mekanisme pembatalan peraturan daerah dan akibat hukumnya berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 8(2), 109–120.
- Profil Kota Banjarmasin. (n.d.-a). <https://kalsel.bpk.go.id/kota-banjarmasin>.
- Profil Kota Banjarmasin. (n.d.-b). <https://umum.banjarmasinkota.go.id>.
- Profil Kota Banjarmasin. (n.d.-c). <https://www.banjarmasinkota.go.id>.
- Pusat Statistik Banjarmasin. (2025). *Survei Kesadaran Masyarakat terhadap Peraturan Pembuangan Sampah Tahun 2025*.
- Rahman, A. (2023). *Rekonstruksi Peran Hakim dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Sidang*. Refika Aditama.
- Rahmayani, C. A., & Aminah, A. (2021). Efektivitas pengendalian sampah plastik untuk mendukung kelestarian lingkungan hidup di kota Semarang. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 18–33.
- Salim, H. S., & N. E. (2013). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Rajawali Pers.

- Sari, H. M., & Afrinaldi, A. (n.d.). Analisis Implementasi Kebijakan Penertiban dan Pengelolaan Kebersihan Lingkungan (Studi Kasus Pengelolaan Sampah Berbasis 3R di Kota Sungai Penuh). *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 23(1), 228–238.
- Sariah, S. (2019). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampah/Kebersihan dan Pertamanan di Banjarmasin*.
- Satjipto Rahardjo. (1991). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Sinar Baru.
- Satriawan, H. A. (2022). Kedudukan AD/ART Partai Politik Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Terkait Kewenangan Uji Materil Oleh Mahkamah Agung. *Jhbbc*, 54–66.
- Satuan Polisi Pamong Praja. (n.d.). <https://satpolpp.banjarmasinkota.go.id/p/visi-dan-misi-satpol-pp.html>.
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*.
- Soekanto, S. (2020). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press.
- Suarni, S., Antoni, H., Asmarani, N., Wahyuni, S., & Amalia, M. (2024). *Buku Referensi Hukum Pidana: Teori komprehensif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Suhaimi, A., Setyawan, S. R. A., Sampelan, I., & Hartati, L. (2021). Kebijakan Pengelolaan Masalah Sampah di Kota Banjarmasin (Perda Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011). *Wasaka Hukum*, 9(2), 383–401.
- Sukarli. (2024, March 29). *DPRD Banjarmasin setuju pengurangan anggaran sektor kebersihan*. [www.kalsel.antaraneews.com](http://www.kalsel.antaraneews.com).

Syuhada, O. (2020). Rekonstruksi Positivisme Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Journal Presumption of Law*, 2(2), 1–23.

Tanjung, A. K. J., & Purwadi, H. (2019). Paradigma Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 7(1), 39–51.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2025-2030. (n.d.).  
<https://Kdh.Banjarmasinkota.Go.Id/2025/02>.

Waluyo, B. (2020). Pengenaan Sanksi Pidana Denda Emas dan Hukuman Cambuk Terhadap Pelanggaran Ketentuan Pidana Yang Diatur Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Perpektif Hukum Pidana Indonesia. *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, 2(1), 760–785.

Widiarto, A. E. (2019). Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 23–42.

Yohanes Andrew, W. (2025). *Desain Kelembagaan Lembaga Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Komparasi Jepang dan Korea Selatan)*.

## LAMPIRAN

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Muhammad Davin Rakhmatullah

Nim : 20210110311256

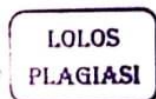
**Dengan Judul Skripsi :**

" Analisis Efektivitas Sanksi Pidana Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 8 Oktober 2025



**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum

**Lampiran 1. Sertifikat Bebas Plagiasi**